BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sekarang ini sedang giat mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Biaya pembangunan untuk menjalankan setiap program-program kerja pemerintah dibutuhkan pemasukan yang diperoleh dari negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya ialah sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa mampu menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak adalah sumber utama bagi penerimaan negara. Hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Pajak memiliki sumbangsih besar dalam pembangunan negara ini. Sekitar 70% lebih sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita bersumber dari pajak, oleh karena itu segala bentuk potensi pajak dan penerimaan pajak harus dikerjakan secara maksimal oleh lembaga pajak yang mumpuni. Melihat dari peranan pajak sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara, maka pemungutan pajak harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah suatu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih lagi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar

dan semakin dapat diandalkan guna kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011).

Peranan penggunaan kendaraan bermotor dirasa mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah, karena banyaknya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat sekarang ini untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Menteri Keuangan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Contohnya dengan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam kemudahan pelaporan, pembayaran, serta kemudahan akses informasi. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapakan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan lebih optimal. Kesadaran terhadap tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Seperti yang telah diketahui, sejak januari sampai dengan oktober 2017, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Pati mencapai Rp 23,1 miliar.

Adapun objek kendaraan terkena pajak terutang sebanyak 132.883 kendaraan, sehingga upaya penagihannya kepada para wajib pajak harus diupayakan secara maksimal. Karena itu, pihak Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pati, kamis (2/11), menandatangani kerjasama penyampaian surat pajak terutang kepada para wajib pajak dengan Kodim 0718 setempat (www.suaramerdeka.com).

Menanggapi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Pati, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membantu memfasilitasi penyediaan mobil operasional untuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) guna mendongkrak penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah setempat. Pada tahun 2017 pendapatan dari pajak kendaraan bermotor bisa mencapai Rp 10 miliar per bulannya, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 14 miliar per bulan. Untuk itu, Pemkab Pati memberikan bantuan mobil supaya bisa menyisir di wilayah pinggiran, seperti Kecamatan Jaken, Pucakwangi, Sukolilo, dan daerah lainnya. Wajib pajak kendaraan bermotor juga bisa membayar secara *online* sehingga keberadaan wajib pajak di luar daerah sekalipun masih dapat membayar pajak tanpa harus kembali ke daerah asalnya (jateng.antaranews.com).

Masyarakat Jawa Tengah khususnya masyarakat Pati, perpanjangan STNK bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa perlu mengantre lama. Pemerintah sudah menyediakan aplikasi e-samsat SAKPOLE yang bisa diunduh di *smartphone* berbasis *android* dan *iOS*. Melalui aplikasi ini masyarakat hanya perlu memasukkan data yang diperlukan. Dari proses pendaftaran *online* ini pengguna akan mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank, transfer melalui atm atau di Indomaret.

Jika sudah melakukan pembayaran pengguna hanya perlu datang ke samsat pusat untuk mencetak STNK tanpa perlu antre panjang (smjtimes.com).

Ada lima faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, antara lain : sanksi administrasi, tingkat pendapatan, sistem samsat *drive thru*, program e-samsat, dan samsat keliling. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan (www.online-pajak.com). Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) menyimpulkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan seluruh penghasilan seseorang dari pihak lain guna memenuhi kehidupan sehari-hari untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdapat ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sistem samsat *drive thru.* Istilah *drive thru* biasa berkaitan dengan layanan milik restoran cepat saji dimana penggunananya tidak perlu turun dari kendaraan untuk menyelesaikan semua pembayaran. Sistem itu diadopsi oleh Polda Metro Jaya dengan nama samsat *drive thru.* Program samsat *drive thru* ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pembayaran pajak tahunan dan pengesahan STNK (www.menpan.go.id). Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdapat ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) menyimpulkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela dan Putri (2020) menyimpulkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah program e-samsat. Program e-samsat adalah program pembayaran perpanjangan STNK melalui aplikasi SAKPOLE di Kabupaten Pati. Pembayarannya bisa melalui bank, transfer melalui atm atau Indomaret. Pada penelitian sebelumnya mengenai progaram e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdapat ketidakkonsistenan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) menyimpulkan bahwa program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraam bermotor.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih, dkk (2019) bahwa program e-samsat belum menunjukkan manfaat yang signifikan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah samsat keliling. Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain. Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdapat konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) menyimpulkan bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana, dkk (2017) menyimpulkan bahwa samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masyarakat patuh membayar Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran, kecepatan, ketetapan dan kemudahan pelayanan yang diberikan petugas salah satunya samsat keliling yang melayani dari tempat ke tempat lain (Dwipayana, dkk, 2017).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) yang meneliti mengenai pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendaptan dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) menggunakan tiga variabel independen yaitu sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan sistem samsat *drive thru*. Pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu program e-samsat dan samsat keliling.

Program e-samsat adalah program pembayaran perpanjangan STNK melalui aplikasi SAKPOLE di Kabupaten Pati. Pembayarannya bisa melalui bank, transfer melalui atm atau Indomaret. Program e-samsat dirasa lebih efektif karena pembayaran dapat dilakukan dimana saja melalui sebuah aplikasi di *smartphone* tanpa harus datang ke samsat induk. Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain. Layanan samsat keliling dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaran bermotor karena dengan beroperasinya samsat keliling layanan yang diberikan lebih memudahkan wajib pajak. Samsat keliling beroperasi dari satu tempat ke tempat lain sehingga dapat lebih menjangkau daerah yang jauh dari Kantor Samsat Pati. Perbedaan kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Puteri, dkk (2019) melakukan studi di Kantor Samsat Kota Padang, sedangkan pada penelitian ini melakukan studi pada Kantor Samsat di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Sistem Samsat *Drive Thru*, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati."**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan supaya penelitian ini lebih fokus pada pokok permasalahan yang ada dan tepat sasaran. Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel independen yang digunakan adalah sanksi administrasi, tingkat pendapatan, sistem samsat *drive thru*, program e-samsat dan samsat keliling. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini objek penelitiannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Pati.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah program e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji pengaruh program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pajak yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Masyarakat Kabupaten Pati

   Penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Disamping

sebagai wujud kepatuhan kita terhadap peraturan pemerintah juga mendukung terciptanya pembangunan bagi kesejahteraan yang merata.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

   Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pandangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor guna mewujudkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal sehingga dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat bersama.

4. Bagi Samsat Kabupaten Pati

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja samsat Kabupaten Pati sebagai sumber informasi dalam mewujudkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sumber referensi pihak lain guna menambah sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.